

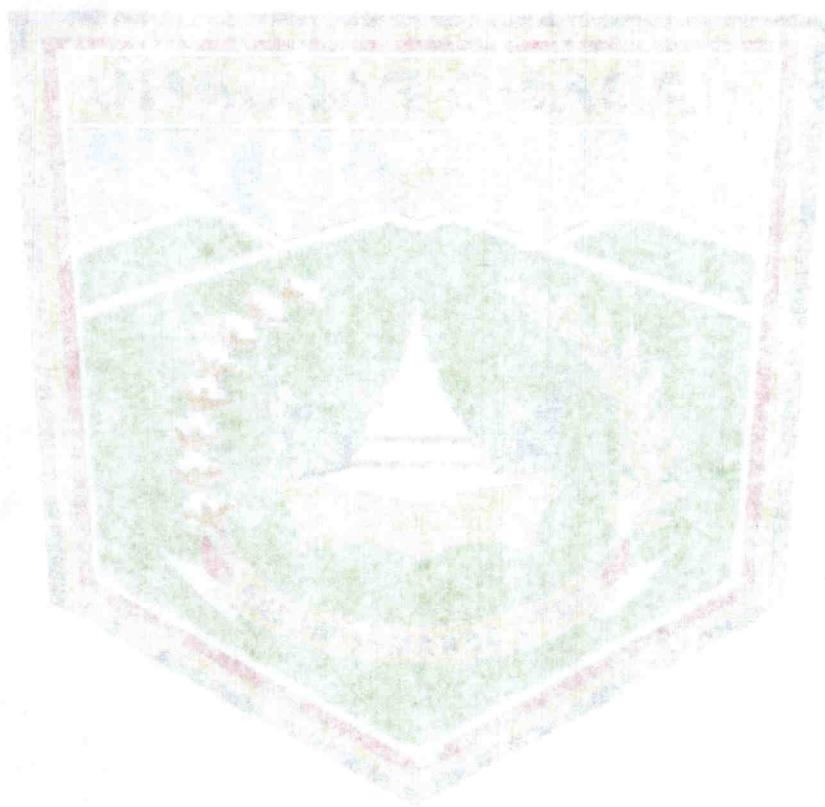
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG SEKRETARIAT DAERAH



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2018

100% COTTON

WASHABLE DURABLE



100% COTTON
WASHABLE DURABLE

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Penjelasan Umum Organisasi	2
D. Sistematika	9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi	10
B. Tujuan dan Sasaran	10
C. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018	12

BAB III AKUKNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	15
B. Capaian Kinerja Tahun 2018	15

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	36
B. Saran	36

PENGANTAR

Alhamdulillah atas Rahmat Petunjuk-nya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 yang merupakan Tanggung Jawab Sekretariat Daerah sebagai salah satu SOPD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu perwujudan transparansi dan Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan Anggaran, karena pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga melaporkan suatu capaian kinerja dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis/ Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2013 – 2018.

Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2018 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus merupakan suatu langkah nyata guna meningkatkan Kinerja pada Sekretariat Daerah untuk selanjutnya.

Disadari walaupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 telah diupayakan semaksimal mungkin namun belum utuh dan sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaannya, terima kasih.

Padang Panjang, Maret 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, salah satu kewajiban SOPD adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap akhir tahun anggaran.

Berkenaan dengan itu, sebagai salah satu SOPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan untuk memenuhi maksud tersebut, maka Sekretariat Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang merupakan gambaran hasil pencapaian sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yang untuk pencapainnya didukung oleh Program dan Kegiatanyang ada di Tahun Anggaran 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah untuk mengetahui sejauh mana capaian dan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, khususnya dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perumusan kebijakan dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan ditahun yang akan datang.

C. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang merupakan salah satu Perangkat Daerah, yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2016 ditegaskan bahwa Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Selanjutnya dalam pasal ini dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap Pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Memahami apa yang telah dikemukakan di atas, maka Sekretariat Daerah disamping sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari : Sekretaris Daerah (eselon II A), 3 (tiga) staf ahli (eselon II B), 3 (tiga) Asisten (eselon II B), 9 (sembilan) Bagian (eselon III A) serta 25 Sub Bagian (eselon IV A).

1. Staf Ahli.

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik ;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang Pemerintahan, hukum dan politik baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan, memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang ekonomi, keuangan dan Pembangunan baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang Kemasyarakatan dan SDM, baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Asisten .

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Trantibum dan Linmas, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga,

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perpustakaan, Kearsipan, Keagamaan, Kecamatan, penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum, perlindungan dan penegakan hak azasi manusia, serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- Dinas Kesehatan;
- Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Dinas Pariwisata;
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- Kecamatan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

a.1 Bagian Pemerintahan ;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kecamatan.

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Pemerintahan umum;
- 2) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Kerjasama.

a.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat ;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana, dan keagamaan.

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Bina Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- 2) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial; dan
- 3) Sub Bagian Bina Keagamaan dan Budaya;

a.3 Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang hukum dan HAM.

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan
- 3) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM ;

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan, serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

- Dinas Pangan dan Pertanian;
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- Dinas Perhubungan;
- Dinas PU dan Penataan Ruang;
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- Dinas Komunikasi dan Informatika.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:

b.1 Bagian Perekonomian;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait koordinasi pembinaan pengembangan potensi dan ekonomi daerah, pengembangan jaringan ekonomi dan pemasaran serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Lingkungan Hidup, serta perbankan dan lembaga keuangan non bank.

Bagian Perekonomian terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
- 2) Sub Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Bina Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.

b.2 Bagian Pengendalian Pembangunan;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengendalian pembangunan serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian.

Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Administasi Program;
- 2) Sub Bagian Pengendalian Kegiatan; dan
- 3) Sub Bagian Bina Infrastruktur.

b.3 Bagian Perencanaan dan Anggaran;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan anggaran.

Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Keuangan.

c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interent, pelayanan barang dan jasa, serta urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi:

- Sekretariat DPRD;
- Inspektorat;
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; dan
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol.

Asisten Administrasi Umum terdiri dari :

c.1 Bagian Organisasi

mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang organisasi.

Bagian Organisasi terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Kelembagaan;
- 2) Sub Bagian Tata Lakasana;
- 3) Sub Bagian Aparatur dan Kinerja.

c.2 Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang umum

Bagian Umum terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum;
- 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- 3) Sub Bagian Layanan Pengadaan.

c.3 Bagian Protokoler dan Dokumentasi

Bagian Protokoler dan Dokumentasi mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang Protokoler dan dokumentasi

Bagian Protokoler dan Dokumentasi terdiri diri

- 1) Sub Bagian Protokoler;
- 2) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
- 3) Sub Bagian Layanan Pengadaan.

2.1. Sumber daya Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Adapun gambaran kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel. 2.1.
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang
Menurut Golongan Tahun 2018

No	Uraian Unit Kerja	Golongan					Jml
		I	II	III	IV	PH	
1	Sekdako	-	-	-	1	-	1
2	Staf ahli	-	-	-	3	-	3
3	Staf pada staf ahli		-	-	-		0
4	Asisten	-	-	-	-	-	0
5	Bagian Pemerintahan	-	2	4	1	-	7
6	Bagian Hukum dan HAM	-	1	4	2	1	8
7	Bagian Organisasi	-	1	6	1	-	8
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	3	5	1	-	9
9	Bagian Perekonomian	-	-	4	1	-	5
10	Bagian Penendalian Pembangunan						
		-	1	5	1	-	7
11	Bagian Umum	2	15	11	1	2	31
12	Bagian Perencanaan dan Anggaran	-	2	7	1	1	11
13	Bagian Protokoler	-	7	12	1	-	20
	Jumlah	2	32	59	14	4	110

D. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Tugas Pokok dan Fungsi
- D. Sistematika Penyusunan LAKIP

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi-Misi SKPD
- B. Tujuan dan Sasaran SKPD
- C. Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2018

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 2018

- A. Metode Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2018
- B. Capaian Kinerja Tahun 2018
- C. Realisasi Anggaran Tahun 2018

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI dan MISI

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi Pemerintah Kota Padang Panjang telah ditetapkan Visi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yakni :

***MENJADI PUSAT PERUMUSAN KEBIJAKAN UMUM
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN UNTUK
MEWUJUDKAN MASYARAKAT AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA***

Dalam rangka menunjang pencapaian Visi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang tersebut, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan perumusan kebijakan umum, yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Meningkatkan perumusan kebijakan umum, yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Meningkatkan perumusan kebijakan umum, yang efektif dan efisien dalam pembinaan sosial kemasyarakatan yang amanah, aman dan sejahtera.
4. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur, disiplin, etos kerja, sarana dan prasarana.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka menunjang pencapaian Misi yang telah ditetapkan tersebut, dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
1	Memantapkan koordinasi perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab	Terselenggaranya urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien
2	Memantapkan perumusan kebijakan umum dalam penyelenggaraan bidang kesehatan, sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan, pendidikan, pemuda dan olah raga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan KB serta agama	Terselenggaranya fasilitasi peningkatan kesehatan masyarakat, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dan Kesejahteraan Sosial Keagamaan serta Pengisian Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah
3	Mewujudkan produk dan tertib hukum daerah yang efektif dan efisien, pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia bagi seluruh perangkat daerah dan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang berlaku
4	Menata Organisasi, tata laksana dan akuntabilitas Perangkat Daerah dalam rangka pendayagunaan aparatur secara efektif dan efisien	Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5	Meningkatkan perumusan kebijakan umum dalam pembinaan produksi daerah, pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah, Sumber Daya Alam, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata secara efektif dan efisien	Terwujudnya penataan Organisasi dan tata Laksana serta Kelembagaan Perangkat Daerah secara efektif dan Efisien
		Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Produksi Daerah dan Pengentasan Kemiskinan
6	Meningkatkan pembinaan, tertib administrasi, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, secara efektif dan efisien	Terwujudnya penyusunan kebijakan peningkatan pembinaan tertib administrasi, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, secara efektif dan efisien.

		Terwujudnya penyusunan kebijakan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
7	Meningkatkan Kualitas pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada pelayanan prima	Terwujudnya Peningkatan Kualitas pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada pelayanan prima
8	Meningkatkan Pengelolaan, Penyusunan rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah	Terwujudnya Penyusunan rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah

C. PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN 2018

Sesuai dengan amanat perundang-undangan, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang telah menyusun Perjanjian Kinerja untuk tahun 2018. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada RPJMD dan Renstra sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Terdapat 11 (sebelas) sasaran dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja. Untuk mencapai sasaran tersebut telah disusun 12 (dua belas) Program anggaran yang tersedia sejumlah Rp. 9.993.458.750,-. Perjanjian Kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	2		
1	1 Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara efektif dan efisien	Penataan Batas Antar Daerah di Kota Padang Panjang Penataan Kecamatan dan Kelurahan	1 Dokumen 2 Kecamatan
2	2 Terselenggaranya fasilitasi peringkatan kesehatan masyarakat, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dan Kesejahteraan Sosial Keagamaan serta Pengisian Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah	Jumlah Sekolah Sehat yang dibina Jumlah Peringatan hari-hari besar Islam Jumlah kegiatan keagamaan yang terfasilitasi Meningkatnya jumlah zakat dan sedekah yang dikumpulkan	4 sekolah 8 HBI 5 kegiatan 3 Milyar
3	3 Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang berlaku	Jumlah Peraturan Daerah yang di Tetapkan Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang di Tetapkan Terdokumentasinya dan tersebar luasnya Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	8 Perda 15 Perwako 2 Dokumen
4	4 Terwujudnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, LKPJ, LKPJ Limatahunan, LPPD, LPPD Limatahunan dan Memori Walikota	5 Dokumen 6 Dokumen
5	5 Terwujudnya Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Kelembagaan Perangkat Daerah secara Efektif dan Efisien.	Persentase SOPD telah menyampaikan SPM Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Meningkatnya persentase SKPD yang mendapatkan Nilai sangat baik dalam Evaluasi Kinerja	100% Baik 75%
6	6 Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Pembinaan dan Money dan Perkembangan KPRI di Kota Padang Panjang	30 KPRI 30 KPRI

	Pengembangan dan Peningkatan Produksi Daerah dan Pengentasan Kemiskinan	Terlaksannya Money dan Koordinasi Pengendalian Inflasi	3 Kali (20 Buku)	3 Kali (20 Buku)
7	Terselenggaranya Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi Pengembangan dan Perkuatan lembaga ekonomi daerah	Koordinasi Pengelolaan Pasar Fasilitasi dan Pembinaan BUMD Terinventarisinya Bank dan Lembaga keuangan non Ban	1 laporan 1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan 1 laporan
	Terlaksananya kajian produksi dan konsumsi pangan Kota Padang Panjang	1 laporan	1 laporan	1 laporan
8	Terwujudnya Penyusunan Kebijakan dan Peningkatan teritib administrasi, pengendalian dan koordinasi dalam Pembinaan pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.	Terlaksananya Evaluasi Kegiatan pembangunan Meningkatnya nilai rata – rata evaluasi fisik kegiatan Meningkatnya Jasa kualitas penyelenggaraan Jasa Kontruksi	12 kali rapat 100%	12 kali rapat 100%
9	Terwujudnya Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Terlaksananya pendidikan dan Sosialisasi penggunaan SPSE dan Aplikasi	6 laporan 96 orang	6 laporan 96 orang
10	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada Pelayanan Prima	Terpublikasinya kegiatan Pembangunan Kota Padang Panjang Tersusunnya Pidato kepala Daerah Terlaksananya Pelatihan Keprotokolan	1 Dokumentasi Visual, 1 Dokumentasi Audio Visual 2 Buku 50 orang	1 Dokumentasi Visual, 1 Dokumentasi Audio Visual 2 Buku 50 orang
	Terlaksananya kegiatan Pemerintahan daerah secara teratur, tertib dan lancar	84	84	84
11	Terwujudnya Penyusunan Rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah	Tersusunnya rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran diukur dengan menggunakan metode membandingkan antara target kinerja yang akan dicapai dengan realisasi kinerja yang telah dicapai.

Untuk memberikan gambaran kinerja tahun berjalan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran juga diuraikan kegiatan dan program yang dilaksanakan pada Tahun 2017 untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran tersebut. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi dari dua metode tersebut, serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Pada Tahun 2018 Sekrtariat Daerah Kota Padang Panjang secara keseluruhan melaksanakan 18 program dengan 75 kegiatan. Namun sesuai dengan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 telah ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

Secara umum semua sasaran yang sudah ditargetkan tersebut telah berhasil diwujudkan.

Adapun persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 5 klasifikasi penilaian yaitu:

- Pencapaian indikator kinerja sasaran $\geq 100\%$ “**Memuaskan**”
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dengan dibawah 100% predikatnya “**Sangat Baik**”
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 70% sampai dengan dibawah 85% predikatnya “**Baik**”
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 55% sampai dengan dibawah 70% predikatnya “**Cukup**”
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0% sampai dengan dibawah 55% predikatnya “**Kurang**”

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran stratejik dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara efektif dan efisien

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara efektif dan efisien dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 88,89% dengan predikat Sangat Baik.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara efektif dan efisien:

NO	INDIKATOR	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Penataan Batas kelurahan di Kota Padang Panjang	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.	Penataan kecamatan dan kelurahan	-	2 kecamatan	-	-

1. Penataan batas Kelurahan di Kota Padang Panjang

Penataan Batas kelurahan untuk Tahun 2018 dilaksanakan dengan realisasi 1 Dokumen dari kegiatan ini telah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait (100%).

2. Penataan kecamatan dan kelurahan, tidak dapat dilaksanakannya kegiatan ini sangat berhubungan dengan belum selesaiya pembahasan tentang batas daerah antara Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar. Dalam perencanaan pada kegiatan ini dana terbesar adalah untuk jasa pihak ketiga dalam membuat kajian terhadap penataan kelurahan dan kecamatan, dengan kelurahan yang diharapkan adalah terbitnya rekomendasi bahwa Kota Padang Panjang dapat diusulkan pemekaran kecamatan dan kelurahan menjadi lebih banyak dari kondisi yang ada saat ini. Hal ini sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat bahwa sudah waktunya dilakukan pembahasan untuk menambah kecamatan dan kelurahan, melalui penataan dan kajian yang akan dilakukan oleh pihak ketiga

Sasaran 2 :Terselenggaranya fasilitasi peningkatan kesehatan masyarakat, pendidikan, pemuda dan olahraga, dan kesejahteraan sosial keagamaan serta pengisian Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terselenggaranya fasilitasi peningkatan kesehatan masyarakat, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dan kesejahteraan Sosial keagamaan serta pengisian Kota Padang Panjang sebagai kota Serambi Mekah dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 135,88% dengan predikat memuaskan.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran :Terselenggaranya fasilitasi peningkatan kesehatan masyarakat, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dan kesejahteraan Sosial keagamaan serta pengisian Kota Padang Panjang sebagai kota Serambi Mekah disajikan pada tabel berikut:

NO	INDIKATOR	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah sekolah sehat yang dibina	TK : 1 SD : 1 SMP :1 SMA : 1 (4 sekolah)	TK : 1 SD : 1 SMP :1 SMA : 1 (4 sekolah)	TK : 1 SD : 1 SMP :1 SMA : 1 (4 sekolah)	100%
2.	Jumlah peringatan hari-hari besar Islam	8 HBI	8 HBI	8 HBI	100%
3.	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi	12 kegiatan	5 kegiatan	9 kegiatan	180%
4.	Meningkatnya jumlah zakat dan sedekah yang dikumpulkan BAZ	Rp.3.086.467.261	Rp.3.040 Milyar	Rp. 3.080.722.627	101.33%

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

1. Jumlah sekolah sehat yang dibina

Pencapaian kinerja Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Padang Panjang dilakukan pada 4 sekolah sehat se Kota Padang Panjang. Adapun 4 (empat) jumlah sekolah sehat yang dibina yaitu 1 Sekolah tingkat TK yaitu TK Pembina, 1 Sekolah tingkat SD yaitu SDN 15 Ngala, 1 Sekolah tingkat SMP/MTsN yaitu SMPN 3, dan 1 Sekolah tingkat SMA/KM yaitu

KM Muhammadiyah. Capaian kinerja ini sama dengan kondisi tahun 2017 dengan capaian 100%

2. Jumlah peringatan hari-hari besar Islam

Pencapaian kinerja Peringatan hari-hari besar Islam di Kota Padang Panjang dilakukan melalui 8 kegiatan peringatan hari-hari besar islam di Kota Padang Panjang sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Capaian kinerja ini sama dengan tahun 2017 yang juga sebanyak 8 kegiatan peringatan hari-hari besar islam. Adapun peringatan hari-hari besar islam tersebut yaitu:

- 1) Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
- 2) Tabliq Akbar menyambut Ramadhan
- 3) Nuzul Qur'an
- 4) Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah
- 5) Halal Bi Halal
- 6) Hari Raya Idul adha 1438 Hijriyah
- 7) Peringatan 1 Muharram 1439 Hijriyah (Tahun Baru Islam)
- 8) Maulid Nabi Muhammad SAW

3. Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi

Pencapaian kinerja Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Kota Padang Panjang dilakukan melalui 9 kegiatan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Kota Padang Panjang sehingga capaian kinerjanya sebesar 180%. Adapun kegiatan keagamaan yang terfasilitasi pada tahun 2018 yaitu:

- 1) Fasilitasi keberangkatan jemaah haji Kota Padang Panjang
- 2) Fasilitasi wirid pengajian majlis taklim bulanan kelurahan
- 3) Pelaksanaan MTQ Kota Padang Panjang.
- 4) Muzakarah ulama Kota Padang Panjang
- 5) Pelaksanaan Pesantren Ramadhan
- 6) Bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan jenazah.
- 7) Peningkatan Kesejahteraan Guru TPQ/TPSQ, Imam Mesjid dan Gharin/Petugas Kebersihan Mesjid/Mushalla, dan Pengurus Baznas Kota Padang Panjang
- 8) Pembinaan Remaja Mesjid Kota Padang Panjang
- 9) Pembinaan Tahfiz Qur'an.

4. Meningkatnya jumlah zakat dan Sedekah yang dikumpulkan BAZ

Pencapaian kinerja Meningkatnya jumlah zakat dan Sedekah yang dikumpulkan BAZ dilakukan melalui kegiatan Pengurus BAZ Kota Padang Panjang sehingga capaian kinerjanya sebesar 101,33%. Dana zakat yang terhimpun tahun 2018 sebesar Rp.3.080.722.627. Jumlah zakat yang terhimpun berasal dari Zakat PNS, zakat dari BUMN dan BUMD, dan Zakat dari Pengusaha muslim lainnya di Padang Panjang.

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target Kinerja Renstra Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2017	Realisasi Tahun 2018
Jumlah sekolah sehat yang dibina	4 sekolah	4 sekolah
Jumlah peringatan hari-hari besar Islam	8 HBI	8 HBI
Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi	12 kegiatan	9 kegiatan
Meningkatnya jumlah zakat dan sedekah yang dikumpulkan BAZ	Rp.3.086.467.261	Rp. 3.080.722.627

Untuk mendukung pencapaian sasaran Terselenggaranya fasilitasi peningkatan kesehatan masyarakat, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dan kesejahteraan Sosial keagamaan serta pengisian Kota Padang Panjang sebagai kota Serambi Mekah dilaksanakan melalui 2 Program dan 12 kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD tahun 2018 sebesar Rp.7,282,835,000,- dengan realisasi sebesar: Rp. 5.365.074.574,-

2 program tersebut sebagai berikut:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Ada panduan yang jelas berdasarkan Keputusan bersama empat Menteri (Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama) tentang pembinaan UKS
2. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar SKPD terkait.

3. Meningkatnya jumlah zakat dan Sedekah yang dikumpulkan BAZ disebabkan oleh meningkatnya kesadaran muzakki untuk membayar zakat.
4. Adanya partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.

Sasaran 3: Terciptanya produk hukum daerah yang aspiratif dan dinamis

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terciptanya produk hukum daerah yang aspiratif dan dinamis serta dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Kota Padang Panjang dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 122,7% dengan predikat sangat baik.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terciptanya produk hukum daerah yang aspiratif dan dinamis disajikan pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Perda yang ditetapkan	5 Perda	8 Perda	5 Perda	62 %
2.	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan	50 Perwako	15 Perwako	67 Perwako	447 %
3.	Terdokumentasinya dan tersebarluasnya peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

1. Jumlah Perda

Selama Tahun 2018, terdapat 5 (lima) Perda yang telah dikeluarkan oleh Bagian Hukum dan HAM. Perda tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017;
- c. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018;

- d. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019.
2. Jumlah Peraturan Kepala Daerah
- Pada Tahun 2018, terdapat 67(enam puluh tujuh) Peraturan Walikota yang telah dikeluarkan oleh Bagian Hukum dan HAM. Kondisi ini melebihi dari target yang direncanakan sebanyak 15 (lima belas) Perwako, sehingga capaiannya menjadi 440%. Perwako tersebut antara lain sebagai berikut :
- 1. Jumlah uang persediaan untuk satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018.
 - 2. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang.
 - 3. Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.
 - 4. Perubahan atas Tarif Restribusi Jasa Usaha.
 - 5. Tarif Restribusi Pemakaian Fasilitas Videotron.
 - 6. Perubahan atas tarif Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 - 7. Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan.
 - 8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
 - 9. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
 - 10. Standar Minimal Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 11. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
 - 12. Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

13. Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018.
14. Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Padang Panjang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.
15. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Padang Panjang.
16. Pedoman Layanan Konsultasi Hukum Secara Online.
17. Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018.
18. Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggara E-Converment.
 - 18.A. Pelaksana Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik.
 - 18.B. Petunjuk Teknik Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Padang Panjang.
19. Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Badan Pengelola Keuangan Daerah.
20. Pedoman Pengelola Sistem Informasi Geospasial Kota Padang Panjang.
21. Pemberian Izin Cuti Keluar Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019.
 - 22.A. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang Tahun 2019
 - 22.B. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2019
 - 22.C. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019
 - 22.D. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang
 - 22.E. Rencana Kerja Dinas Perumahan , Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2019
 - 22.F. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang

Panjang Tahun 2019

- 22.G. Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun
2019
- 22.H. Rencana Kerja Dinas Pangan Dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2019
- 22.I. Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang
Tahun 2019
- 22.J. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2019
- 22.K. Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019
- 22.L. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Padang Panjang Tahun 2019
- 22.M. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun
2019
- 22.N. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2019
- 22.o. Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
- 22.P. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019
- 22.Q. Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2019
- 22.R. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun
2019
- 22.S. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Padang Panjang Tahun 2019
- 22.T. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019
- 22.U. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2019
- 22.V. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2019
- 22.W. Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2018
- 22.X. Rencana Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Padang Panjang Tahun 2019

23. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017.
 24. Perubahan RKPD 2018
 25. Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018
 26. Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
 28. Pedoman pemusnahan arsip.
 29. Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Padang Panjang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 30. Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019
 31. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
 32. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018
 33. Penghargaan Tokoh Masyarakat.
 34. Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
 35. Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik.
 36. Tata Cara Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang.
 37. Tata Cara Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang.
 38. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Padang Panjang.
 39. Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019.
 40. Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
 41. Tambahan Penghasilan Pegawai Dan Penyesuaian Standar Biaya Perjalanan Dinas Kepada Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Terdokumentasinya dan tersebarluasnya peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah. Pendokumentasi dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan telah dilakukan pada tahun 2018 sesuai dengan target yaitu 2 (dua) dokumen dengan persentase 100%.

Sasaran 4 : Terwujudnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat memuaskan.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disajikan pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
	Tersedianya dokumen LAKIP dan Penetapan Kinerja, LKPJ, LKPJ AMJ, Memori Wako, LPPD dan LPPD AMJ	5 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	116,66 %

Dari indikator yang ditetapkan pada sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tercapai 100% atau berpredikat memuaskan. Penyusunan Laporan Kinerja Kota Padang Panjang telah disusun sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan disampaikan paling lambat tiga bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Demikian juga dengan Perjanjian Kinerja dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pada awal tahun anggaran dan setelah perubahan APBD 2018. Demikian juga LKPJ dan LPPD telah disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Padang Panjang.

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target Kinerja Renstra Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019
Tersedianya dokumen LAKIP dan Penetapan Kinerja, LKPJ, LKPJ AMJ, Memori Wako, LPPD dan LPPD AMJ	5 Dokumen	7 Dokumen	-

Terdapat 2 program dan 4 kegiatan pendukung pencapaian sasaran ini, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.315.387.5000,- dan realisasi sebesar Rp. 290.098.041,-.

Program tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran 5: Terwujudnya Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Kelembagaan Perangkat Daerah secara Efektif dan Efisien.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Kelembagaan Perangkat Daerah secara Efektif dan Efisien dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 82.33% dengan predikat baik.

Hasil pengukuran capaian kinerja Terwujudnya Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Kelembagaan Perangkat Daerah secara Efektif dan Efisien disajikan pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
1	% SOPD yang telah menyampaikan laporan SPM	100 %	100%	100%	100%
2	Nilai IKM	Baik	Sangat Baik	Baik	75%
3	Meningkatnya persentase SKPD yang mendapatkan nilai sangat baik dalam evaluasi kinerja	58.33%	75%	54,17%	72%

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

1. % SOPD yang telah menyampaikan laporan SPM

Pencapaian kinerja % SOPD yang telah menyampaikan laporan SPM untuk 6 (Bidang) bidang di Kota Padang Panjang dilakukan oleh seluruh SKPD pengumpul SPM yaitu sejumlah enam SOPD, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Pelaporan SPM ini dilakukan oleh SOPD secara online kepada Kementerian/Lembaga terkait dan laporan tersebut juga dikumpulkan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Capaian ini sama dengan tahun 2017.

2. Nilai IKM

Pencapaian kinerja Nilai IKM di Kota Padang Panjang belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaian menjadi 75% dengan predikat baik. Pada tahun 2018 telah dilakukan survey IKM pada 24 unit pelayanan yakni : Kelurahan 16 (2 Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur), Puskesmas Gunung, Puskesmas Busur, Puskesmas Kebun Sekolos, Puskesmas Koto Katik, Dinas Capil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan nilai IKM untuk semua unit tersebut masuk kepada kategori baik. Nilai IKM ini memberikan gambaran bahwa pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di Kota Padang Panjang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat (baik).

3. Meningkatnya persentase SOPD yang mendapatkan nilai sangat baik dalam evaluasi kinerja

Indikator Meningkatnya persentase SOPD yang mendapatkan nilai sangat baik dalam evaluasi kinerja terealisasi sebesar 54,17% kurang dari target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerjanya adalah 72% dengan predikat baik.

Kegiatan evaluasi kinerja ditujukan untuk lebih memacu SOPD dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target Kinerja Renstra Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018
% SOPD yang telah menyampaikan laporan SPM	100%	100%
Nilai IKM	Baik	Baik
Meningkatnya persentase SKPD yang mendapatkan nilai sangat baik dalam evaluasi kinerja	75%	54,17%

Terdapat 2 program dan 7 kegiatan pendukung pencapaian sasaran ini, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.403.525.000,-dan realisasi sebesar Rp.352.958.471,- .

2 Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan
2. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran 6 : Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Produksi Daerah dan Pengentasan Kemiskinan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Produksi Daerah dan Pengentasan Kemiskinan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat memuaskan.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Produksi Daerah dan Pengentasan Kemiskinan disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator	Realisasi tahun 2017	Tahun 2018		
			target	Realisasi	% capaian
1	Terlaksananya koordinasi dan Monev Penyaluran Raskin	16 kelurahan	-	-	-
	Terlaksananya Monev dan Koordinasi Pengendalian Inflasi	3 kali (20 buku)	3 kali (20 buku)	3 kali (20 buku)	100%
	Terlaksananya Pembinaan dan Monev dan perkembangan KPRI di Kota Padang Panjang	30 KPRI	30 KPRI	30 KPRI	100%
	Terlaksananya Pembinaan dan Monev Sumber daya alam dan lingkungan hidup	4 kali rapat (60%)	-	-	-

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan KPRI

Hasil kegiatan ini adalah telah terlaksananya monitoring 30 KPRI Kota Padang Panjang dan Pembinaan Koperasi dengan pola syariah bagi 10 KPRI. Alokasi dana sebesar **Rp. 55.150.000,-** (Lima Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang mana realisasi fisik mencapai **100%** dan realisasi keuangan **Rp. 49.399.192,-** (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dengan persentase **89,57%**.

2. Terlaksananya Monev dan Koordinasi Pengendalian Inflasi

Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi adalah terbentuknya Tim Inflasi Kota Padang Panjang Tahun 2017 dan terselenggaranya rapat tim Inflasi Daerah dan monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Padang Panjang Tahun 2017, dengan alokasi dana sebesar Rp. **32.500.000,-** (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan **Rp. 29.129.275,-** (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan persentase **89,63%**.

Sasaran 7: Terselenggaranya Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi Pengembangan dan Perkuatan lembaga ekonomi daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terselenggaranya Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi Pengembangan dan Perkuatan lembaga ekonomi daerah dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat memuaskan.

Hasil pengukuran capaian kinerja Terselenggaranya Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi Pengembangan dan Perkuatan lembaga ekonomi daerah disajikan pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018		
			TARGET	REALISASI	% Capaian
1.	Terlaksananya Kajian Lembaga Pengelolaan Pasar	1 Dokumen	-	-	-
2	Terlaksananya koordinasi kebijakan pengelolaan pasar pusat	-	1 tahun	1 tahun	100%
3	Tersusunnya Seleksi Direktur BUMD	1 Kegiatan	-	-	-
4	Terlaksananya fasilitas dan Pembinaan BUMD	-	2 kali	2 kali	100%
5	Terinventarisir dan Tersosialisasinya dengan baik profil Bank dan Lembaga Keuangan Non bank di Kota Padang Panjang	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
6	Terlaksananya Kajian Produksi Pangan dan Konsumsi Pangan Kota Padang Panjang	-	1 dokumen	1 dokumen	100%

Berdasarkan Tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Sasaran telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan capaian 100%.

1. Terlaksananya koordinasi kebijakan pengelolaan pasar pusat alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar **Rp. 85.000.000,-** (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang mana realisasi fisik mencapai **100%** dan realisasi keuangan **Rp.**

45.557.656,- (Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau **53,60%**. Rendahnya realisasi keuangan di sebabkan karena keputusan akhir tentang lembaga pengelola Pasar Pusat Kota Padang Panjang adalah terletak di UPTD yang berada di lingkup OPD Dinas Perdagangan Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah bukan BUMD sebagaimana direncanakan semula. Dengan demikian rapat-rapat teknis tentang Pengelolaan Pasar lebih banyak di selenggarakan oleh Dinas Perdagangan Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, sedangkan Bagian Perekonomian membantu menyiapkan rancangan regulasi dan mengkoordinirkan hal-hal yang bersifat lintas OPD sesuai arahan Sekdako selaku tumpuan OPD

2. Terlaksananya fasilitas dan Pembinaan BUMD

Fasilitas dan Pembinaan BUMD Kota Padang Panjang alokasi untuk kegiatan ini dana sebesar **Rp. 32.000.000,-** (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).Realisasi fisik mencapai **100%** dan realisasi keuangan **Rp. 21.125.526,-** (Dua Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau **66,02%**. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena terdapat 1 (satu) BUMD yang tidak beroperasi atas rekomendasi BPK sehingga pembinaan difokuskan untuk 1 (satu) BUMD saja (PDAM).

3. Terlaksananya Kajian Produksi Pangan dan Konsumsi Pangan Kota Padang Panjang. Hasil dari Kegiatan ini adalah terlaksananya kajian produksi Pangan Kota Padang Panjang bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar **Rp. 56.850.000,-** (Lima Puluh Enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). dengan Realisasi fisik mencapai **100%** sedangkan realisasi keuangan **Rp. 56.113.775,-** (Lima Puluh Enam Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan persentase **98,70 %**.

4. Terinventarisir dan Tersosialisasinya dengan baik profil Bank dan Lembaga Keuangan Non bank di Kota Padang Panjang. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya profil Perbankan Kota Padang Panjang dan terselenggaranya forum perusahaan, lembaga keuangan bank dan non bank Kota Padang Panjang. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar **Rp. 12.150.000,-** (Dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah). Adapun Realisasi fisik **100%** dan realisasi keuangan **Rp. 11.712.125,-** (sebelas juta tujuh ratus dua belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan persentase **96,40%**.

Sasaran 8: Terwujudnya Penyusunan Kebijakan dan Peningkatan tertib administrasi, pengendalian dan koordinasi dalam Pembinaan pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya Penyusunan Kebijakan dan Peningkatan tertib administrasi, pengendalian dan koordinasi dalam Pembinaan pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 99% dengan predikat memuaskan.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya Penyusunan Kebijakan dan Peningkatan tertib administrasi, pengendalian dan koordinasi dalam Pembinaan pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien disajikan pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018		
			TARGET	REALISASI	% Capaian
1.	Terlaksananya evaluasi kegiatan pembangunan	12 bulan	12 kali rapat	12 kali rapat	100%
2.	Meningkatnya nilai rata-rata evaluasi fisik kegiatan	99,00	100%	97,99%	97,99
3.	Meningkatnya Jasa kualitas penyelenggaraan Jasa Konstruksi	85%	6 laporan	-	-

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

1. Terlaksananya evaluasi kegiatan pembangunan

Indikator Terlaksananya evaluasi kegiatan pembangunan telah tercapai dengan memuaskan, dengan capaian 100%. Kegiatan evaluasi kegiatan ini dilakukan setiap bulan mulai dari Februari sampai dengan Desember 2018.

2. Meningkatnya nilai rata-rata evaluasi fisik kegiatan

Dari indikator yang ditetapkan, capaiannya sudah kurang dari target yang direncanakan yaitu 97,99% dengan predikat memuaskan dimana dari target 100% dapat terealisasi 97,99%.

3. Meningkatnya Jasa kualitas penyelenggaraan Jasa Konstruksi dari target 6 laporan, namun kegiatan ini dipindahkan tidak dilaksanakan pada Sekretariat Daerah kota Padang Panjang tapi dipindahkan ke Dinas PUPR.

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target Kinerja Renstra Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018
Terlaksananya evaluasi kegiatan pembangunan	100%	12 kali rapat
Meningkatnya nilai rata-rata evaluasi fisik kegiatan	116.47%	97,99%
Meningkatnya Jasa kualitas penyelenggaraan Jasa Konstruksi	100%	-

Terdapat 2 Program dan 2 Kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 334.981.250,- dan realisasinya sebesar Rp. 280.432.107,-.

Program tersebut adalah :

1. Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran 9: Terwujudnya Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Ketentuan yang Berlaku dengan 1(kegiatan) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 100% dengan predikat memuaskan.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Ketentuan yang Berlaku disajikan pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	% Capaian
4.	Terlaksananya pendidikan/ sosialisasi LPSE	96 orang	96 orang	96 orang	100

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

1. Terlaksananya pendidikan/ sosialisasi LPSE, SIRUP.

Indikator ini sudah sesuai target yang direncanakan yaitu 100% dengan predikat memuaskan. Pendidikan dan sosialisasi LPSE diikuti oleh sebanyak 96 orang sesuai dengan target yang diteapkan dengan dana Rp.60.640.000 dengan Realisasi Rp. 58.266.950

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target Kinerja Renstra Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018
Meningkatnya pengetahuan PA, KPA, panitia pejabat pengadaan serta PPK pengadaan barang dan jasa Pemerintah	100%	100%
Meningkatnya persentase registrasi dan verifikasi proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah oleh LPSE	100%	100%
Meningkatnya persentase jumlah panitia pejabat pembentukan PPK dalam mengoperasionalkan LPSE	100 %	100%
Terlaksananya pendidikan/ sosialisasi LPSE, SIRUP dan monev online	100%	100%

Sasaran 10: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada Pelayanan Prima

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan keprotokolan dan Dokumentasi yang mengacu pada Pelayanan Prima adalah mencapai 129 % melebihi target yang ditetapkan dengan uraian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Penyebarluasan informasi kegiatan Pemerintah Daerah melalui Media Massa	45 Media Cetak	-	-	-
		5 Media Online	-	-	-
		4 Media Elektronik	-	-	-

2.	Tersusun pidato Kepala Daerah	84 Dokumen	2 buku	4 buku	200%
3	Terpublikasinya kegiatan pembangunan kota padang Panjang	-	1 Dokumen Visula, 1 Dokumen Audio Visual	2 Dokumen	100%
4	Terlaksananya Pelatihan keprotokolan	-	50 orang	50 orang	100 %
5	Terlaksanya kegiatan pemerintahan daerah secara teratur, tertib dan lancar	-	84 kegiatan	96 kegiatan	114,29%

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut,

1. Terpublikasinya kegiatan pembangunan kota padang Panjang mencapai 100 % sama dengan Tahun 2017
2. Tersusun pidato/ ekspose Walikota Padang Panjang
Pidato/ ekspose Walikota padang panjang tahun 2018 melebihi target yang telah ditetapkan melebihi target yaitu sebanyak 96. dokumen 114,29 %
3. Pelatihan keprotokolan terlaksana 100 %
4. Terlaksanya kegiatan pemerintahan daerah secara teratur, tertib dan lancer mencapai 114.29 %

Untuk mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat serta keprotokolan yang efektif dan efisien dilaksanakan melalui 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 1.014.126.800,- dengan realisasi Rp. 721.895.664,-

2 (dua) Program tersebut sebagai berikut :

1. Kerjasama Informasi dengan Media Massa.
2. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.

2. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat penyuluhan bagi Masyarakat.
3. Adanya penunjang Operasional Pidato Kepala Daerah.
4. Optimalisasi Penyelenggaraan Keprotokolan.
5. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri.
6. Pelatihan SDM Dalam Bidang Protokol Dan Mc

Sasaran 11: Terwujudnya Penyusunan Rencana dan Pelaporan serta Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya Penyusunan Rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 100% dengan predikat memuaskan.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya Penyusunan Rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	% Capaian
4.	Tersusunnya Rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Dalam pelaksanaanya pencapaiaan kinerja penyususn Rencana dan pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah tidak mempunyai kegiatan/anggaran khusus, tapi terdapat pada anggaran Pelayanan Administrasi Perkantoran.

C. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran pada tiap-tiap sasaran perlu dilakukan analisis guna mendapatkan bahan dalam pengalokasian dana pada tahun berikutnya. Anggaran yang dilakukan analisis adalah anggaran belanja langsung pada SOPD. Anggaran untuk Tahun 2018 adalah Rp. 11.014.885.550,- dan realisasi Rp. 8.450.478.845,-

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dalam Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018, telah dianalisis sebanyak 11 sasaran dengan 27 indikator kinerja. Secara umum capaian kinerja tahun 2018 telah dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan target indikator sasaran. Pencapaian ini didukung oleh 1

15 program dan 61 kegiatan, dengan realisasi keuangan rata-rata persasar mencapai 76,72 %.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlunya perencanaan yang baik dalam penyusunan Renstra dan perjanjian kinerja yang mengacu pada RPJMD serta penganggaran yang baik sehingga taget kinerja dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.
2. Perlunya komitmen dan konsistensi dari seluruh Bagian-Bagian yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dalam meningkatkan sinkronisasi antara Dokumen Renstra dengan RPJMD dan PK serta program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Diharapkan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018 dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pencapaian kinerja yang akan datang.

Padang Panjang, Maret 2019
**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

MARTONI, S.Sos, M.Si
NIP.197303041993081001

BAB IV

PENUTUP

A. KERIMAHUAN

Setelah dibaca dan dipahami dengan teliti dan dengan penuh pemahaman, maka saya setuju dan mengakui bahwa isi surat ini benar-benar merupakan hasil kerjasama dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Saya setuju dan mengakui bahwa isi surat ini benar-benar merupakan hasil kerjasama dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

BAB V

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pada bagian pembukaan surat ini, sebaiknya ditambahkan kalimat "Berdasarkan hasil konsultasi dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tangerang Selatan, kami mengusulkan agar pada pembentukan Badan Pengelolaan dan Perkembangan Desa di Kabupaten Tangerang Selatan, dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Desa agar sesuai dengan kondisi dan karakteristik desa-desa di Kabupaten Tangerang Selatan".
2. Pada bagian pembukaan surat ini, sebaiknya ditambahkan kalimat "Berdasarkan hasil konsultasi dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tangerang Selatan, kami mengusulkan agar pada pembentukan Badan Pengelolaan dan Perkembangan Desa di Kabupaten Tangerang Selatan, dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Desa agar sesuai dengan kondisi dan karakteristik desa-desa di Kabupaten Tangerang Selatan".

Surat ini ditulis pada

Babasa Padang Panjang Maret 2018
KOTA PADANG PANJANG
Pj. Sekretaris Dinas
KOTA PADANG PANJANG

MARTONI, S.Sop, M.Si
NIP. 182303041980081001